



**ANALISIS RUNTUT WAKTU PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2003-2008**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

LILIANA KARTIKA SARI
NIM. 070810391229

**PROGRAM STUDI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
"TRAGEDI LUMPUR LAPINDO"
(Studi Kasus Pada PAD Kabupaten Sidoarjo)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Liliana Kartika Sari

NIM : 070810391229

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Juli 2010

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 197204162001121001

Sekretaris : Whedy Prasetyo, SE, MSA, CPMA Ak (.....)
NIP 197705232008011012

Anggota : Hendrawan Santoso Putra, SE, M.Si (.....)
NIP. 19740506 2002121006

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Prof. Dr. H. Moh Saleh, M.Sc
NIP. 195608311984031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIANA KARTIKA SARI

NIM : 070810391229

Jurusan : S.1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : ANALISIS RUNTUT WAKTU PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2003-2008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan instansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2010

Yang menyatakan,

LILIANA KARTIKA SARI
NIM. 070810391229

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS RUNTUT WAKTU PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN
2003-2008

Nama : LILIANA KARTIKA SARI

NIM : 070810391229

Jurusan : S.1 AKUNTANSI

Disetujui : 23 Juni 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Whedy Prasetyo, SE, MSA, CPMA Ak

NIP 197705232008011012

Hendrawan Santoso Putra, SE, M.Si

NIP. 19740506 2002121006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak

NIP. 19720416 200112 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

Allah SWT Yang Telah Memberikan Rahmat dan HidayahNya,

Suami dan Anakku tercinta

Ayah dan Ibu

Yang telah memberikan dorongan moril maupun materil serta yang telah mendidik dan menekankan kejujuran dan keuletan dalam hidup

Dan karena restunya,

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Terlebih kehidupan indah yang diberikan kepada penulis, sekarang dan esok....

Adik-adikku

Yang Telah Memberi Semangat Padaku Tuk Menyelesaikan Skripsi ini

To all My Best Friends,

Almamater Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Universitas Jember yang slalu Kubanggakan

Guru-guruku sejak SD sampai PTN terhormat yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan membimbing dengan penuh kesabaran

Serta Semua Pihak Yang Membutuhkan Karya Ini Untuk Tujuan Mulia.

MOTTO

Allah SWT berfirman “ ..bertakwallah kepadaKu, hendaknya setiap orang memerhatikan perbuatan yang ia lakukan untuk hari esok, karena Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “
(QS. Al-Hasyr 59;18)

Jangan lewatkan waktu kita tanpa makna dan tanpa kerja. Apa yang kita raih pada masa yang akan datang sangat ditentukan dengan apa yang kita lakukan pada saat ini.
(What we are going tomorrow we are becoming today)
(La Tahzan)

“...Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap....”
(QS. Al Insyiroh : 6-8)

Jika kalian semua benar-benar bersyukur kepadaKu, niscaya aku tambah nikmatKu...
(QS. Ibrahim 14:7)

“Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than anyone thing.”
(Abraham Lincoln)

“Jika pikiran saya bisa membayangkannya, hatinya bisa meyakininya. Saya tahu saya akan mampu menggapainya.”
(Jesse Jackson)

ABSTRACT

The purpose of this analysis is to analyzed the PAD of Sidoarjo dictrict in the year of 2003-2008. In this analysis, will be analyzed the increasing and decreasing the number of PAD and all of the component inside and describe the factors that might cause the increasing and decreasing the PAD 2003-2008.

The analysis metode is time series by doing descriptive analysis toward relialization of PAD report in the years of 2003-2008.

The result of the analysis toward relialization of PAD report in the years of 2003-2008 knowing that PAD growth significantly in the years of 2005-200. But PAD in the yaer of 2004 has a little decreasing because of the decreasing of taxes.

Keywords: *PAD, Time series metode*

ABSTRAK

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan PAD yang tinggi mengingat di kabupaten Sidoarjo terdapat banyak industri, dimana Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen penyusun PAD di Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008. Dalam penelitian ini akan dianalisis naik turunnya PAD serta komponen-komponen di dalamnya pada periode tersebut serta mendeskripsikan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kenaikan atau penurunan PAD tahun 2003-2008.

Analisis yang dilakukan dengan metode *time series* dengan menggunakan pendekatan deskriptif terhadap laporan realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008.

Dari hasil analisis terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008 diketahui bahwa PAD mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2005-2008. PAD tahun 2004 mengalami sedikit penurunan dikarenakan penurunan pajak.

Kata Kunci: PAD, Metode *time series*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Rasio Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Adanya Bencana Lumpur Lapindo*** . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa upaya, do'a serta dukungan, arahan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan, meskipun penulis sadar bahwa tanggung jawab skripsi ini ada pada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Saleh, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan dan Bapak Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh studi.
3. Bapak Whedy Prasetyo, SE, M. SA, CPMA, Ak selaaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hendrawan, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing II. Kompetensi, pengalaman, dan ketegasan beliau dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan wawasan yang tak ternilai dalam proses penulisan usulan suatu skripsi. Telah senantiasa mengarahkan, serta saran yang konstruktif dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan studi referensi keilmuan terhadap penyelesaian skripsi ini berikut semoga dapat bermanfaat dan berguna di masa-masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dan mencatat amal kita sebagai amal yang diridhoiNya, serta senantiasa memberikan karunia rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 30 Juni 2010

Penulis

Liliana Kartika Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	

2.1	Landasan Teori.....	4
2.1.1	Akuntansi Pemerintah Daerah.....	4
2.1.2	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5
2.1.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5
2.1.4	Sumber-Sumber APBD.....	7
2.1.5	Pengukuran Kinerja.....	9
2.2	Penelitian Terdahulu	12
2.3	Kerangka Pemikiran.....	14
BAB 3. METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Sumber Data	15
3.2	Objek Penelitian	15
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	15
3.4	Analisa Data	18
3.5	Kerangka Pemecahan Masalah	19
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Sejarah Kabupaten Sidoarjo	20
4.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo	25
4.3	Analisis PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2008	31
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	35
5.2	Keterbatasan.....	36
5.3	Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2008.....	25
4.2	Rincian PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2003.....	26
4.3	Rincian PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2004.....	27
4.4	Rincian PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2005.....	28
4.5	Rincian PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2006.....	29
4.6	Rincian PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2007.....	29
4.7	Rincian PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2008.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemecahan Masalah	19
4.1	PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2008	33



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- A. Laporan Realisasi PAD Kab. Sidoarjo
- B. Grafik PAD Kab. Sidoarjo Tahun 2003-2008

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel DAU dan PAD terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Propinsi Jawa Timur periode. Dari analisis regresi linier berganda diperoleh hasil penelitian bahwa variabel DAU dan PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah.

Variabel DAU memiliki pengaruh dominan/paling besar terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Propinsi Jawa Timur. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini berarti telah terjadi *Flypaper effect*.

Koefisien determinasi menunjukkan angka 97.5 %. Hal ini berarti variabel bebas dalam hal ini DAU dan PAD memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu 97.5 % terhadap belanja daerah. Dengan demikian hanya 2.5% variabel belanja daerah dipengaruhi variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Kata kunci : DAU, PAD, belanja daerah

ABSTRACT

The purpose of the analysis is to analyzed the effect of DAU and PAD toward region expenditure of The City in East Java Province. By using multiple regression analysis knowing that DAU and PAD have positive significant effect toward region expenditure.

DAU has a dominant effect toward region expenditure of The City in East Java Province. This condition shows that DAU has more effect toward region expenditure than PAD, it means flaypaper effect happen.

The point of determinant coefficient is 97.5%, it means the independent variable DAU and PAD have a significant effect 97.5% toward region expenditure. It means variable region expenditure influenced by other variable only 2.5%.

Keywords : *DAU, PAD, region expenditure*

ALLAH SWT berfirman “ ..bertakwallah kepadaKu, hendaknya setiap orang memerhatikan perbuatan yang ia lakukan untuk hari esok, karena Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “

(QS. Al-Hasyr 59;18)

Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. **(Nabi Muhammad Saw)**

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

(Khalifah ‘Umar)

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. **(Abu Bakar Sibli)**

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. **(Imam An Nawawi)**

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. **(Mahatma Gandhi)**

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. **(Evelyn Underhill)**

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

judul;

flypaper effect DAU and PAD toward region expenditure of The City in East Java Province

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan. Sebelum adanya reformasi, pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, PEMDA Tk-1 sudah sejak lama (25 tahun lebih) dimanjakan oleh bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Desa (PEMDA Tk-III) dianaktirikan dengan bantuan minimal. (Waluya, 2001).

Pemerintah pada tahun 2000 melakukan perubahan atau reformasi pada manajemen keuangan daerah serta mengganti UU dan memberlakukan otonomi daerah. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini di karenakan masih terdapat daerah miskin dan daerah tidak miskin. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, diharapkan mampu memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dapat diduga terjadi. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan daerah. Otonomi daerah mulai dilaksanakan tahun 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menangani pembangunan di daerah yang

di akibatkan ketidakmerataan dalam alokasi bantuan dari pemerintah pusat yang akan berpengaruh dalam pertumbuhan antar daerah. (Halim, 2004).

Keuangan daerah yang baik dapat ditunjukkan oleh realisasi PAD yang tinggi. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan PAD yang tinggi mengingat di kabupaten tersebut terdapat banyak industri, dimana Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mana merupakan salah satu komponen penyusun PAD di Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi. Oleh karena itu melalui uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti PAD Kabupaten Sidoarjo dari komponen-komponen penyusunnya dengan metode *time series*, dimana tahun penelitian adalah tahun 2003-2008.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah, yaitu: bagaimanakah PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya Analisis Keuangan terhadap PAD, diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai realisasi PAD, serta kebijakan yang sesuai untuk mencapai PAD yang optimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah dan Tujuan Akuntansi Pemerintah.

Menurut Halim (2004:34) Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditor, dan donator, analis ekonomi, dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:28) tujuan akuntansi pemerintah yaitu :

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Abdul Halim (2004), APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut UU nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan pajak untuk propinsi meliputi obyek pendapatan berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan di atas air
- e. Pajak air di bawah tanah
- f. Pajak air permukaan

Selanjutnya, jenis pajak kabupaten dan kota tersusun atas

- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir
2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Jenis pendapatan ini meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - d. Retribusi pengujian kapal perikanan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Negara/ BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi :
- a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

2.1.4 Sumber-Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 bab IV sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :
 - (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - (2) Jasa giro
 - (3) Pendapatan bunga

- (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
 - (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
- 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :
- a) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari :
 - (1) Pajak, bersumber dari: pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21
 - (2) Sumber Daya Alam, berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
 - b) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Lain-lain pendapatan, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.
- a) Pembiayaan
Pembiayaan bersumber dari :

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah adalah selisih lebih relisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- (2) Penerimaan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah bersumber dari:
 - (a) pemerintah
 - (b) pemerintah daerah lain
 - (c) lembaga keuangan bank
 - (d) lembaga keuangan bukan bank
 - (e) masyarakat
- (3) Dana Cadangan Daerah
Dana Cadangan Daerah dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan aktiva tetap milik pemerintah daerah.

2.1.5 Pengukuran Kinerja

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk (Halim, 2004:148) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja pemerintah antara lain :

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. (Halim, 2004:150).

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Rasio efektivitas penerimaan dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan APBD dengan target penerimaan APBD yang ditetapkan. Untuk mengukur rasio efektivitas penerimaan pada daerah dapat dikhususkan pada penerimaan

berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Halim,2004 dalam Khoirunisak dan Hamzah, 2007)

c. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. (Haryadi, 2005).

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya dalam belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin besar persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin , maka semakin kecil dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan.(Halim, 2004).

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja rutin dan belanja pembangunan) dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. (Halim, 2004). Belanja rutin adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan untuk digunakan membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh

masyarakat. Belanja pembangunan adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Waluya (2001) melakukan penelitian tentang analisis rasio PAD dan APBD terhadap kebijakan kemandirian keuangan daerah otonom pada periode 1995 sampai 1999 dan 2000 sampai 2001, menghasilkan temuan bahwa dana perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang realistis sekitar Rp. 59 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN 2001 yang realistis sekitar Rp. 200 triliun maka rasio PAD dan APBN hanya sekitar 29.5%. Dengan demikian, Daerah Otonom harus mampu menggali potensi PAD dan APBD lebih dari 70%. Beberapa hal yang harus diingat, adalah :

1. Rata-rata Propinsi se-Indonesia hanya mampu memperoleh PAD dan APBD sekitar 10.07%
2. Pemerintah Daerah Tk-I hanya mampu menggali PAD dan APBD sekitar 15.7% - 34%
3. Pajak Daerah dan APBD di Pemerintah Daerah Tk-I telah mencapai 81.71%
4. Pemerintah Daerah Tk-II hanya mampu menggali PAD dan APBD sekitar 23.65% - 35.35%
5. Pemerintah Daerah Tk-III (Desa dan Kelurahan) rata-rata hanya mampu menggali PAD dan APBD hingga 48.75%

Penelitian ini juga menemukan adanya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan keuangan dari Pusat sebagai berikut :

1. Ketergantungan Pemerintah Daerah Tk-I terhadap bantuan keuangan dari pusat minimal 40%. Ada juga Propinsi yang sangat kuat ketergantungannya terhadap bantuan Pusat hingga 85%.

2. Ketergantungan Pemerintah Daerah Tk-II dari bantuan Pemerintah Pusat sekitar 21.71% sampai dengan 26.73% dan ketergantungan terhadap pemberian Pemerintah Daerah Tk-I sebesar 44.79% sampai dengan 48.70%.
3. Ada juga Kabupaten dan Kotamadya yang sangat kuat ketergantungannya terhadap Pusat ditambah Pemerintah Daerah hingga 80%.
4. Ketergantungan Desa terhadap Pusat dan Pemerintah Daerah hanya separuh dari kemampuannya.

Sohidin dan Ngadiman (2004), menguji kinerja keuangan APBD pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2000 sampai 2004. Upaya peningkatan pendapatan daerah tahun 2000-2004 telah berhasil meningkat, bahwa PAD tahun 2000-2004 mengalami kenaikan rata-rata 35% yang artinya telah melampaui target dalam renstra yang hanya rata-rata 25,9%. Hal ini dapat terbukti dengan hasil analisis berikut :

1. Kenaikan PAD tertinggi 54,71% yang terjadi pada tahun 2001.
2. Kenaikan PAD dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2000-2004, semakin menurun.
3. Perbandingan antara PAD terhadap APBD tertinggi 11,01% yang terjadi pada tahun 2000.
4. Pada realisasi APBD Boyolali tahun 2000-2004, perbandingan PAD terhadap APBD dari tahun 2001-2004 perubahan perbandingan sedikit.
5. Kenaikan pendapatan yang berasal dari propinsi dan pusat tertinggi 156,1% yang terjadi pada tahun 2001.

Sementara itu, perkembangan kebijakan belanja APBD tahun 2000-2004 merupakan manifestasi pelayanan publik sebagaimana yang dijelaskan, bahwa pembelanjaan rutin dan pembangunan pada tahun 2000-2002 tertinggi tahun 2001. Jumlah pembelanjaan tahun 2001 adalah sebesar Rp. 242.887.417.920,080 merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Peningkatan dari tahun 2000-2001 mencapai 145,66%.

Pembelanaan APBD tahun 2003-2004 tidak mengalami perubahan besar. Peningkatan pembelanaan dari tahun 2003-2004 mencapai 1,36%. Pembiayaan yang terjadi pada tahun 2003, penerimaan daerah lebih tinggi dibanding dengan pengeluaran daerah. Jadi pada tahun 2003 terjadi kelebihan penerimaan daerah. Sedangkan pembiayaan yang terjadi pada tahun 2004, penerimaan daerah lebih rendah dibanding dengan pengeluaran daerah. Jadi pada tahun 2004 terjadi kelebihan pengeluaran daerah.

Haryadi (2002) mencoba menguji *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah periode 1995 sampai 2000 di propinsi Jawa Timur menyimpulkan hasil pengujiannya dua tahun sebelum dan sesudah *fiscal stress* bahwa rasio tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat desentralisasi fiskal menunjukkan pada periode sebelum krisis lebih besar signifikan dari pada setelah krisis, sedangkan tingkat kemampuan mobilisasi daerah menunjukkan bahwa periode sebelum krisis lebih besar dari pada setelah krisis. Pengujian satu tahun sebelum dan sesudah *fiscal stress*, menunjukkan hasil yang konsisten dengan pengujian dua tahun.

Arifin (2005) melakukan pengujian kinerja keuangan sebelum dan pada fiskal stress terhadap beberapa Kabupaten dan Kota di propinsi Jawa Barat tahun 1995 sampai 2000 dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemampuan pembiayaan daerah pemerintah Kabupaten dan Kota lebih tinggi sebelum fiskal stress dibandingkan saat fiskal stress. Pada pengujian satu tahun konsisten dengan pengujian dua tahun.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008 yaitu dengan menganalisis naik turunnya masing-masing komponen pembentuk PAD dengan metode *time series*, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kenaikan atau penurunan PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2008.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu yaitu data yang secara kronologi disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu berupa realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo sebelum tahun 2003-2008.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan atau organisasi dalam bentuk yang sudah jadi dan telah dipublikasikan (telah diaudit). Publikasi disini mempunyai arti data tersebut telah diperlihatkan dan diterbitkan kepada masyarakat umum misalnya laporan keuangan yang *go public*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website *pusaka-sda.blogspot.com* dan *www.sidoarjakab.go.id*

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kab. Sidoarjo periode tahun 2003-2008.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2003-2008. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut UU nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan pajak untuk propinsi meliputi obyek pendapatan berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan di atas air
- e. Pajak air di bawah tanah
- f. Pajak air permukaan

Selanjutnya, jenis pajak kabupaten dan kota tersusun atas

- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir
2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Jenis pendapatan ini meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - d. Retribusi pengujian kapal perikanan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Negara/ BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi :

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

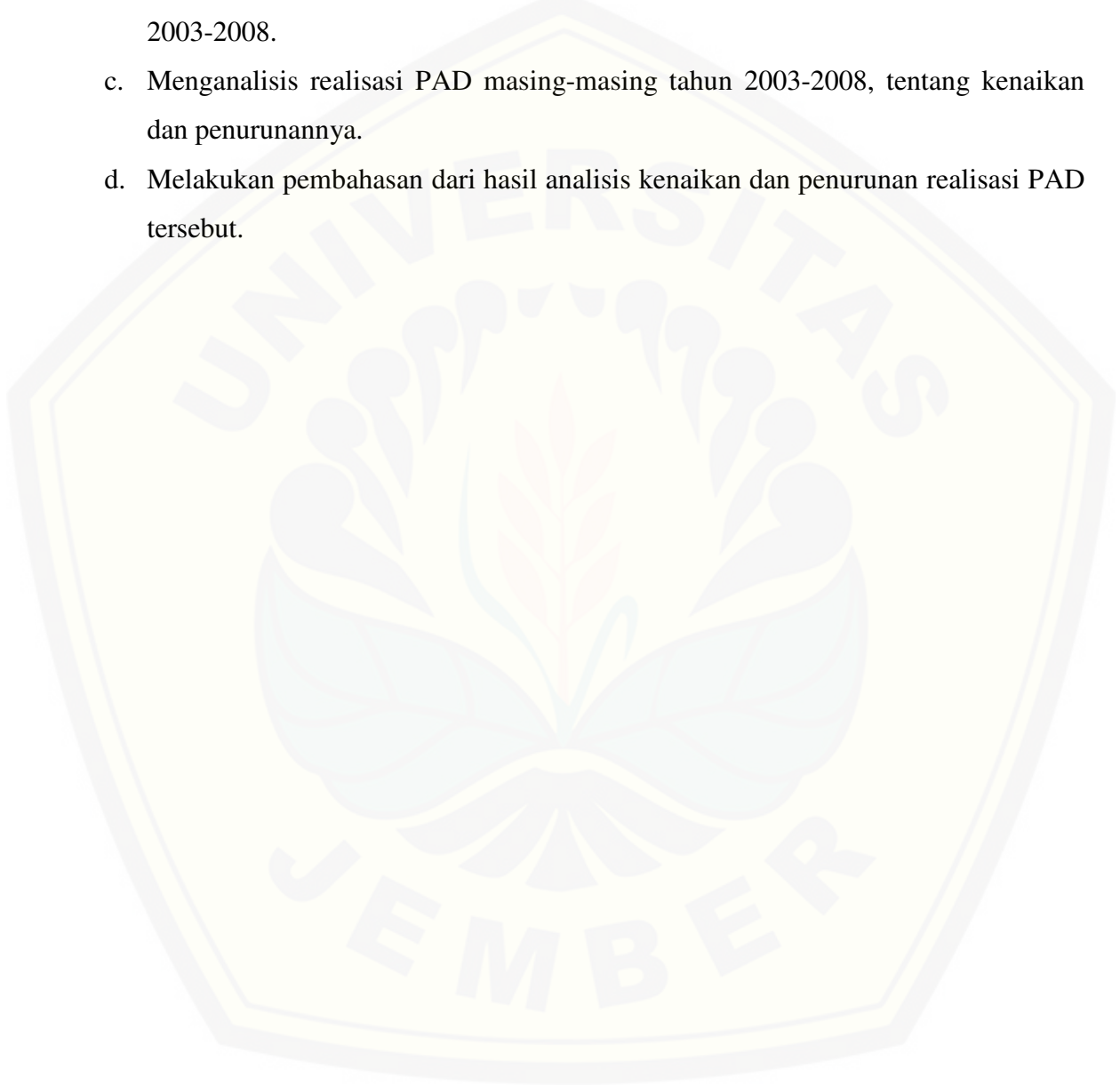
3.4 Analisa Data

Teknik yang dipakai dalam menganalisa data adalah analisis *time series* dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode Deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

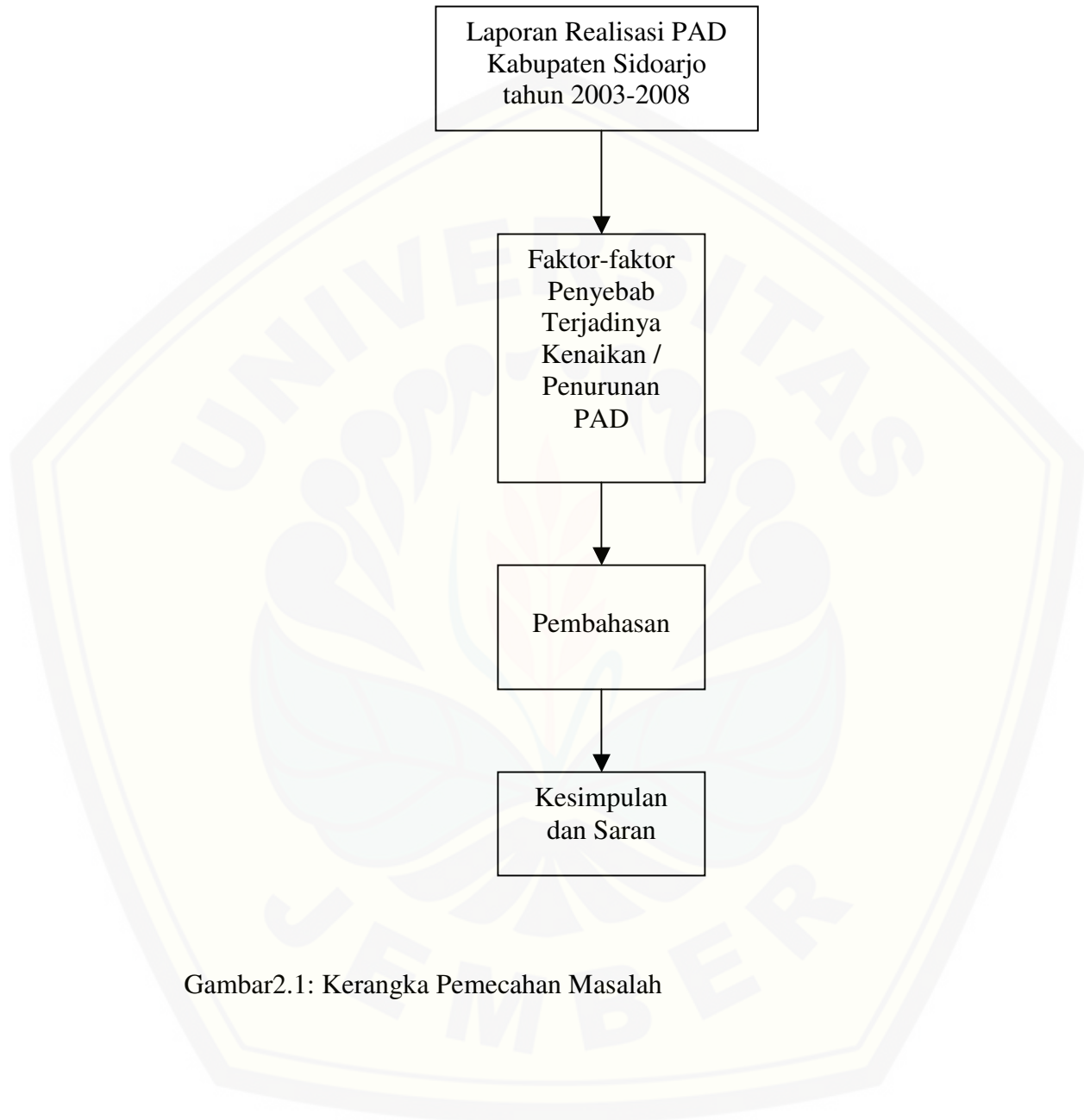
Dari data realisasi pendapatan asli daerah akan dianalisis dari tahun 2003-2008 tentang kenaikan atau penurunannya. Kemudian kenaikan atau penurunan tersebut akan dianalisis faktor penyebabnya, dan ada tidaknya kaitan dengan adanya

bencana Lumpur Lapindo. Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan analisa data:

- b. Mengumpulkan data yang diperlukan yaitu berkaitan tentang realisasi PAD tahun 2003-2008.
- c. Menganalisis realisasi PAD masing-masing tahun 2003-2008, tentang kenaikan dan penurunannya.
- d. Melakukan pembahasan dari hasil analisis kenaikan dan penurunan realisasi PAD tersebut.



3.5 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar2.1: Kerangka Pemecahan Masalah